

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Pilar Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2006.
- Agus Salim Nasution, *Materi Pokok Pajak dan Retribusi Daerah*, Ctk.3, Universitas Terbuka, Jakarta, 2001.
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Cetakan Pertama, 2018.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Ctk.5, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Zakat dan Wakaf*, Grasindo, Jakarta, 2007.
- Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Ctk. 1, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2003.
- Hadari nawawi, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, Ctk. 3, Erlangga, Jakarta, 1993.
- Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, PT Refika Aditama, Bandung, Cetaka Pertama, 2011.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2013.
- Marihot Pahala, *Hukum Pajak Elementer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- _____, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Mukhtie Fajar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peadilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT Alumni, 2004.

Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Ctk. 1, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Taman Rekreasi dan/ atau Olahraga.

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 53 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Taman Rekreasi dan/ atau Olahraga.

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Wonosobo.

Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo.

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 65 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Inspektorat Kabupaten Wonosobo.

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo.

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Wonosobo.

C. Data Elektronik

Asyari, “Keuangan Negara Dalam Islam (Melacak Sumber-Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran Negara)”, *Al-Hurriyah*, terdapat dalam <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/379>

